

PENELITIAN KELOMPOK

LAPORAN HASIL PENELITIAN



**PEMBERDAYAAN LEMBAGA MEDIASI DALAM
MENGATASI SENGKETA PERTANAHAN DI
KABUPATEN PATI**

Peneliti :

Ristamadji, SH M.H

Dr. Sukresno, SH., MHum

Dr. Suparno, SH., MS

**Dibiayai Oleh Anggaran Belanja Universitas Muria Kudus
Tahun Anggaran 2010/2011**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

HALAMAN PENGESAHAN

- 1.1 Judul penelitian :Pemberdayaan Lembaga Mediasi Dalam Mengatasi Sengketa Pertanahan Di Kabupaten Pati
- 1.2 Ketua peneliti
- a. Nama dan gelar : Ristamadji, SH., M.H
 - b. Bidang keahlian : Ilmu Hukum
 - c. NIS : 0610701000001029
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - e. Fak/Jurusan : Hukum
 - f. Alamat kantor : Fakultas Hukum UMK
 - g. Telp/fax : 0291-431515
- 1.3 Anggota peneliti dosen : Dr. Sukresno, SH., MHum
: Dr. Suparoyo, SH., MS
- Anggota peneliti mahasiswa : Moch Agus Prsetyo NIM : 2010-20-108
: Adi Febriyanto NIM : 2010-20-005
: M. Khaerudin Salami. NIM : 2010-20-042
: Lensa Sylviani P., NIM : 2010-20-076
: Maryati, NIM : 2010-20-015
- 1.4 Subjek Penelitian : Pemberdayaan Mediasi Pertanahan
- 1.5 Pelaksanaan penelitian : Desember 2010 s/d Januari 2012
- 1.6 Jumlah anggaran : 4.000.000
- 1.7 Lokasi penelitian : Kabupaten Pati
- 1.8 Hasil yang ditargetkan : Optimalisasi mediasi pertanahan
- 1.9 Instansi lain yang terlibat : Kantor Pertanahan Pati

Kudus, 08 Januari 2013

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Hukum

Peneliti

Ristamadji, SH., M.H
Nis: 0610701000001029

Ristamadji, SH., M.H
Nis: 0610701000001029

Rektor
Universitas Muria Kudus

Ka. Lembaga Penelitian

Prof. Dr. dr. Sarjadi, SpPA
NIP: 130 887 224

Drs. Taufiq MS, MM
NIP: 195004111980031001

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahNya, sehingga pada kesempatan ini, penulis dapat menyelesaikan penelitian berkaitan dengan mediasi pertanahan ini.

Penelitian yang berjudul pemberdayaan lembaga mediasi dalam mengatasi sengketa pertanahan di kabupaten Pati ini, telah disusun dengan sungguh-sungguh sehingga dapat mendukung tri darma perguruan tinggi yang dapat peneliti kontribusikan. Dalam penyusunan penelitian ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan penelitian ini dapat terealisasikan.

Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Muria Kudus Prof. Dr. dr. Sarjadi, SpPA, Kepala Lembaga Penelitian Drs. Taufiq MS, MM. dan semua pihak yang telah membantu penelitin ini. Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Namun penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 10 Nopember 2012

Peneliti

INTISARI

Mediasi pertanahan sebagai bagian alternatif penyelesaian sengketa melalui non litigasi mempunyai posisi startegis. Namun fakta menunjukkan mediasi pertanahan di kabupaten Pati masih belum mampu dimaksimalkan. Sengketa di bidang pertanahan di Kabupaten Pati dari Tahun 2007 sampai dengan 2011 sebanyak 39 kasus terdiri dari kepemilikan dan penguasaan sebanyak 38 kasus, sengketa batas letak tanah 1 kasus. Jumlah sengketa sebanyak 39 kasus ini yang berhasil diselesaikan secara damai sebanyak 13 kasus (33%), sedangkan yang gagal (tidak berhasil) sebanyak 16 kasus (67%). Berangkat dari kondisi demikian tentunya ada keinginan sebuah upaya pemberdayaan yang dapat dilakukan agar mediasi pertanahan dapat terlaksana dengan maksimal.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apakah yang menjadi latar Belakang Dibutuhkannya Pemberdayaan Mediasi Pertanahan, apakah yang menjadi penyebab Pemberdayaan Mediasi Pertanahan Belum Maksimal dan bagaimana model pemberdayaan lembaga mediasi yang lebih efektif bagi para pihak sehingga mediasi pertanahan dapat teraktualisasi secara maksimal.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif, tipe penelitian deskriptif analitis dan sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan data sekunder. Pengumpulan sumber data primer meliputi wawancara dan observasi. Sedangkan metode pengumpulan data sekunder adalah dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Sedangkan metode analisa yang digunakan adalah analisa secara kualitatif.

Hasil penelitian mendiskripsikan bahwa lembaga mediasi dalam penyelesaian sengketa di bidang pertanahan perlu diberdayakan karena tipologi atau karakter sengketa pertanahan selalu berkembang seiring dengan dinamika di masyarakat dan upaya mengurangi beban perkara pertanahan di pengadilan. Beberapa faktor yang merupakan problematik sehingga menghambat atau tidak dapat dicapai secara maksimal penggunaan lembaga mediasi yaitu Faktor karakteristik sengketa atau akar permasalahan yang menimbulkan sengketa di bidang pertanahan, Faktor internal dan eksternal para pihak yang bersengketa, Faktor mediator yang belum berdaya, Faktor sarana dan prasarana yang ada pada lembaga yang masih minim dan lain-lain. Unsur utama dari proses pemberdayaan adalah pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas. Kedua unsur tersebut tidak bisa dipisahkan, oleh karena apabila masyarakat telah memperoleh kewenangan tetapi tidak atau belum mempunyai kapasitas untuk menjalankan kewenangan maka hasilnya juga tidak optimal.

Kata kunci : Pemberdayaan, Lembaga Mediasi dan Sengketa Pertanahan

ABSTRAK

Mediation land as part of an alternative dispute resolution through non-litigation have strategic positions. But the facts show Pati mediation of land in the district is not able to be maximized. Disputes in land in Pati regency from 2007 to 2011 a total of 39 cases consisted of ownership and control as many as 38 cases, the location of the land boundary disputes 1 case. The number of disputes as many as 39 cases were successfully resolved amicably as many as 13 cases (33%), while failing to (unsuccessfully) as many as 16 cases (67%). Departing from such conditions would no desire an empowerment to do so mediation can be accomplished with a maximum land.

Issues that will be addressed in this study is whether the background Rear Mediation Needed Empowerment Land, whether that be the cause of empowerment of Land Mediation Maximum Yet the empowerment and how to model a more effective mediation to the parties that mediation can be actualized to the maximum land.

The research method used was a qualitative approach, the type of descriptive analytical research and data sources used consisted of the primary data source and secondary data. The collection of primary data sources include interviews and observation. While the secondary data collection method is by collecting primary legal materials, legal materials and secondary legal materials tertiary. The method of analysis used was a qualitative analysis.

The results describe that the mediation in dispute resolution in the areas of land need to be empowered as typologies or character of land disputes is always evolving as the dynamics of the community and efforts to reduce the burden of land cases in court. Some of the factors that are impeding problematic or can not be achieved to the maximum use of the mediation that is characteristic factors or root causes of disputes arising from the dispute in the land sector, internal and external factors of the parties to the dispute, the mediator factor that has not been empowered, facilities and infrastructure factors There are still minimal in institutions and others. The main element of the process of empowerment is giving authority and capacity development. These two elements can not be separated, because if the community has gained authority but does not yet have the capacity or authority to run the results are not optimal.

Keywords: Empowerment, Mediation Institute and Land dispute

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
INTISARI	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	01
B. Tujuan Penelitian.....	07
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).....	08
B. Karakteristik dan Manfaat Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)....	12
C. Mediasi Pertanahan Sebagai Bagian dari APS.....	17
D. Aspek Hukum Dalam Implementasi Mediasi.....	19
E. Kebutuhan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan.....	32
B. Tipe penelitian.....	32
C. Sumber Data.....	33
D. Metode Pengumpulan Data	33
E. Metode Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Latar Belakang Dibutuhkannya Pemberdayaan Mediasi Pertanahan.....	36
B. Penyebab Pemberdayaan Mediasi Pertanahan Badan Pertanahan Kabupaten Pati Belum Maksimal.....	39
C. Model Pemberdayaan Mediasi Pertanahan Pada Badan Pertanahan Kabupaten Pati Yang Lebih Efektif Bagi Para Pihak.....	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 1.1	Tipologi dan Jumlah Sengketa di Bidang Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Tahun 2007 – 2011.....	48
Tabel 1.2	Jumlah Mediasi Berhasil/Damai dan Mediasi Gagal dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Tahun 2007-2011.....	49